



**WAR
ON
DRUGS**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA TARAKAN**

2022





RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA TARAKAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu komponen/siklus dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan berupa *input*, *output* dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja.

Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan tahun 2020-2024 sepenuhnya telah mengacu dan mendukung Renstra BNN RI, yang ditetapkan oleh Kepala BNN RI dengan komponen visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja *outcome* dan *output* yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan.

Penentuan target yang harus dicapai oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya.

Dalam tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan akan melaksanakan dua sasaran program dengan delapan sasaran kegiatan. Kegiatan akan diimplementasikan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan merupakan dukungan terhadap *outcome* atas kinerja BNN RI.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu

saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan.

Tarakan. 20 Januari 2022

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Tarakan



Agus Sutanto, S.E.M.S.i

NIP. 19690822 199901 1 001



iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu masalah serius yang terus menyita perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan Presiden RI telah menetapkan Indonesia dalam Darurat Narkoba Nasional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh pelosok tanah air, baik secara geografis maupun demografis.

Secara demografis, tidak ada satu lapisan masyarakat pun baik dari segi usia, jenjang pendidikan, jenis pekerjaan, status ekonomi dan sosial, suku, agama yang tidak pernah terjerat penyalahgunaan narkoba. Secara geografis, tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang terbebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk di wilayah Provinsi Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan. Letak dan posisi yang strategis menjadikan Kota Tarakan sebagai salah satu sentra industri dan pintu gerban transportasi ke kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai Kota yang berada dekat dengan tapal batas perbatasan antara malaysia dan indonesia menyebabkan Kota Tarakan menjadi tempat transit sebelum ke daerah lainnya dan tempat tujuan peredaran gelap narkoba khususnya narkoba yang berasal dari malaysia.

Jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terus meningkat dari tahun ke tahun hal ini dapat dilihat dari data capaian Pemberantasan BNN Kota Tarakan yang selalu melebihi target khususnya peningkatan capaian penanganan kasus narkoba tahun 2018 dan 2019. Tahun 2018 jumlah target yang diberikan sebanyak 6 kasus

yang terungkap sebanyak 18 kasus atau capaian 300 %. demikian Tahun 2019 jumlah target yang diberikan sebanyak 3 kasus yang terungkap sebanyak 5 kasus atau capaian 166 %. Disisi lain data tindak kejahatan dari Polres Kota Kota Tarakan tahun 2019 dan 2020 masih menempatkan kasus narkoba sebagai salah satu kasus kejahatan yang masih menonjol/dominan jika dibandingkan dengan kasus kejahatan lainnya. Demikian juga data dari Lapas Kelas II Kota Tarakan tahun 2019 dan 2020 tentang warga binaan maka jumlah warga binaan tentang kasus narkoba masih menjadi kasus yang menonjol/dominan jika dibandingkan dengan kasus kejahatan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan data tahun 2019 dan tahun 2020 dimana tahun 2019 jumlah warga binaan sebanyak 249 orang dari jumlah tersebut kasus narkoba sebanyak 198 orang, ini berarti sekitar 79 % kasus narkoba dibandingkan dengan kasus kejahatan lainnya. Sedangkan tahun 2020 jumlah warga binaan sebanyak 320 orang dari jumlah tersebut tentang kasus narkoba sebanyak 160 orang, atau sekitar 50 % kasus narkoba dibandingkan dengan kasus kejahatan lainnya.

Disisi lain penanganan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika belum optimal jika melihat jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kian meningkat seperti Fasilitas rehabilitasi yang masih sangat terbatas ditambah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah Kota Tarakan baik perhatian dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi maupun dukungan anggaran rehabilitasi.

Dalam rangka merespon kondisi dan situasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kota Tarakan. Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan telah melakukan koordinasi lintas sektoral/lembaga tentang Rencana Aksi Nasional (RAN P4GN) Intruksi Presiden No 02

tahun 2020-2024 khususnya peran aktif dari pemerintah kota tarakan dalam pelaksanaan RAN P4GN.

2. Hasil Evaluasi

Mengenai permasalahan yang dihadapi BNN Kota Tarakan memperhatikan pada kondisi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

a. Problematika pengawasan peredaran

Isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

1. Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
2. Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
3. Karakteristik Kerawanan Kota Tarakan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika masuk kategori bahaya karena didukung oleh Jumlah pengguna Narkotika, barang bukti hasil penangkapan, menjadi pintu masuk penyelundupan narkotika melalui jalur laut dan udara.

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

1. Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
2. Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.
3. Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya

untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

4. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan. Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a Fasilitas rehabilitasi yang masih sangat terbatas atau secara kuantitas tidak bertambah setiap tahunnya, sehingga secara kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa intervensi institusional yang dilakukan BNN Kota Tarakan masih kurang optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian kinerja penguatan lembaga rehabilitasi yang dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga rehabilitasi baik instansi pemerintah dan komponen masyarakat masih di bawah target.
- b Dukungan anggaran rehabilitasi dari pemerintah kota Tarakan masih belum optimal hal dapat dilihat dari pos anggaran untuk layanan rehabilitasi yang belum dianggarkan sehingga layanan rehabilitasi tidak berjalan sesuai ketentuan.
- c Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah menyebabkan masyarakat belum mengetahui mekanisme layanan rehabilitasi.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN KOTA TARAKAN
TAHUN 2022

Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan menetapkan rencana kinerja Tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2022. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di di Kota Tarakan.

Alokasi anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.351.781.000,-. Adapun anggaran ini dialokasikan kedalam 2 program untuk melaksanakan berbagai fungsi di lingkungan BNN, yaitu:

NO	FUNGSI	ANGGARAN	%
A	Program pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika(P4GN) sebesar Rp. 730.845.000,-		
1	Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.363.790.000,-	15,47%
2	Rehabilitasi	Rp.194.145.000,-	8,26%
3	Pemberantasan	Rp.172.910.000,-	7,35%
B	Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 1.620.936.000,-		
1	Bagian Umum	Rp. 1.620.936.000	68,92%
	JUMLAH	Rp.2.351.781.000	100 %

Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Tarakan Tahun 2022, sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00 Indeks	Rp 65.000.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68 Indeks	Rp 104.000.000,-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,22 Indeks	Rp 194.790.000,-
4	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	Rp 11.480.000,-
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit	
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks	Rp 168.165.000
6	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	5 Berkas Perkara	Rp 165.060.000
7	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87,00 Indeks	Rp 16.168.000
8	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks	Rp 98.706.000

Sementara rincian kinerja, komponen kegiatan dan alokasi anggaran per seksi dan Time Line serta Rencana Penarikan Dana(RPD) dapat dilihat dilampiran I dan II.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BNN Kota Tarakan Tahun 2022 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kota Tarakan tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kota Tarakan selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh seksi di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran I
Rincian kebutuhan pendanaan
Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan
Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Total Anggaran	Kode	Output/Sub Output	Anggaran Sub Komponen
3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	98.706.000	3236.EBA	Layanan Perkantoran	81.020.000
			3236.EBD	Layanan Manajemen Keuangan	17.686.000
3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	19.628.000	3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	19.628.000
3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	16.168.000	3238.EBD	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	16.168.000
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	1.466.434.000	3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.172.723.000
			3239.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	293.711.000
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	20.000.000	3979.EBA	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	20.000.000
3247	Penyelenggaraan Advokasi	104.000.000	3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	40.000.000
			3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	64.000.000
3256	Pascarehabilitasi penyalahguna dan /atau pecandu narkoba	15.400.000	3256.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan	15.400.000
3257	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	194.790.000	3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	194.790.000

3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	7.850.000	3258.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	7.850.000
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	11.471.000	3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	11.471.000
3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	167.274.000	3260.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	145.150.000
			3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22.124.000
5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	165.060.000	5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	165.060.000
5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	65.000.000	5936.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	65.000.000

A	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	1			11.350.000										11.350.000
B	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	1			16.700.000										16.700.000
053	Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah														42.195.000
A	Workshop Penggiat P4GN Instansi Pemerintah	1			16.885.000										16.885.000
B	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine	2						1.110.000							1.110.000
C	Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	15					2.500.000	2.500.000	2.500.000						7.500.000
D	Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada Sektor Kelembagaan	1					16.700.000								16.700.000
054	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di instansi Pemerintah														11.160.000
A	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Instansi Pemerintah	10									2.500.000	2.500.000			5.000.000
B	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	1											160.000		160.000
C	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	12											3.000.000	3.000.000	6.000.000
058	Pemetaan Kelompok Sasaran di Lingkungan Masyarakat														11.350.000
A	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	1			11.350.000										11.350.000
059	Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat														35.285.000
A	Workshop Penggiat P4GN Lingkungan Masyarakat	1			16.885.000										16.885.000
B	Pengembangan Kapasitas P4GN pada lembaga Adat dan Komunitas berbasis kearifan lokal	1			18.400.000										18.400.000
060	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat														10.100.000
A	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Masyarakat	10									2.500.000	2.500.000			5.000.000
B	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	1											100.000		100.000
C	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	10										2.500.000	2.500.000		5.000.000
061	Pemetaan Kelompok Sasaran di Lingkungan Pendidikan														11.350.000
A	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	1			11.350.000										11.350.000
062	Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan														34.700.000
A	Workshop Penggiat P4GN Lingkungan Pendidikan	1			16.885.000										16.885.000
B	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine	1					1.115.000								1.115.000
C	Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada Lingkungan Pendidikan	1					16.700.000								16.700.000
063	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan														10.100.000
A	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Pendidikan	10										2.500.000	2.500.000		5.000.000

B	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	1												100.000	100.000	
C	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	10												2.500.000	2.500.000	5.000.000
TOTAL			-	11.360.000	69.400.000	95.125.000	58.485.000	61.100.000	3.610.000	13.800.000	11.300.000	5.000.000	23.750.000	10.860.000	363.790.000	

SEKSI PEMBERANTASAN

No	Nama Kegiatan	Vol	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	JUMLAH
5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	5													165.060.000
5354.BCA.002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	5													165.060.000
051	Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	5													165.060.000
A	Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika			12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000			62.500.000
B	Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika			19.012.000		19.012.000		19.012.000		19.012.000		19.012.000			95.060.000
C	Koordinasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000			7.500.000
3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti														7.850.000
3258.BAA.002	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU Penyelenggaraan Asesmen Terpadu Bagi Penyalahguna Narkotika	2													7.850.000
051	Pelaksanaan Asesmen Terpadu	2													7.850.000
A	Target Layanan TAT	2				3.925.000				3.925.000					7.850.000
TOTAL			-	33.012.000	-	36.937.000	-	33.012.000	-	36.937.000	-	33.012.000	-	-	172.910.000

SEKSI REHABILITASI

No	Nama Kegiatan	Vol	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	JUMLAH
3256	Pasca Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	5													15.400.000
3256.FAE.001	Data dan Pelaporan Klien Rehabilitasi	5													15.400.000
051	Pengolahan Data														15.400.000
A	Pengukuran Kualitas Hidup		8.500.000										6.900.000		15.400.000
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	5													11.471.000
3259.ADG.001	Petugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan	5													11.471.000
051	Pelatihan Petugas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat														11.071.000
A	Bimbingan Teknis Petugas IBM		11.071.000												11.071.000
052	Monitoring Rencana Aksi Petugas Rehabilitasi dan Petugas AP														400.000
A	Monitoring Rencana Aksi					400.000									400.000
3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat														167.274.000
3260.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	360													145.150.000
3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/KOTA	30													54.790.000
051	Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP Dan BNNK	30													23.570.000
A	Operasional Fasilitas Rehabilitasi Di BNN Kota		10.970.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	450.000	900.000	23.570.000
052	Layanan Rawat Jalan														31.220.000
A	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan		14.220.000					11.500.000				5.500.000			31.220.000

052	Renovasi Gedung dan Bangunan														293.711.000
A	Renovasi Gedung dan Bangunan	1	293.711.000												293.711.000
No	Nama Kegiatan	Vol	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	JUMLAH
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	1 L													20.000.000
3979.EBA.958	Layanan Humas dan Informasi														20.000.000
054	Publikasi Informasi Kelembagaan Instansi Vertikal BNN														20.000.000
A	Press Release	6		584.000		584.000		583.000		583.000		583.000		583.000	3.500.000
B	Kegiatan Kehumasan	9	900.000							900.000				900.000	2.700.000
E	Pengadaan Bahan Informasi Kelembagaan	2				1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000		1.725.000	1.725.000	1.725.000	13.800.000
			474.272.500	92.379.200	87.555.200	138.372.700	88.781.200	156.959.700	93.621.200	90.564.200	133.157.700	88.964.200	87.173.200	89.135.000	1.620.936.000
			TOTAL ANGGARAN												2.351.781.000



RENCANA KINERJA TAHUNAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA TARAKAN
2022

**WAR
ON
DRUGS**